

EDITORIAL

Pada mulanya politik dianggap sebagai tulang punggung sejarah, demikian dinyatakan oleh Kuntowijoyo (2003: 174). Oleh karena itu pula, lanjutnya, teks-teks sejarah selalu berisi rentetan kejadian mengenai raja, negara, bangsa, pemerintahan, parlemen, pemberontakan, kelompok-kelompok kepentingan, dan interaksi antara kekuatan-kekuatan itu dalam memperebutkan kekuasaan. Namun demikian, anggapan ini pun mengalami perubahan. Sejarah semakin diperluas dengan berbagai aspek lain di luar politik, yakni dengan kemunculan sejarah sosial, sejarah ekonomi, dan sejarah kebudayaan. Hal itu karena, orang mulai meragukan keterkaitan antara sejarah dan politik dalam hubungan yang melulu tentang kekuasaan. Selain itu, cara orang melihat dan mengerjakan sejarah politik itu sendiri pun, mulai berubah. Akibatnya, tema-tema dalam sejarah politik pun semakin berkembang, dengan kemunculan sejarah politik tentang lingkungan, keagamaan, perkotaan, bahkan pendidikan. Tema-tema inilah yang menjadi warna dalam *Jurnal Sejarah Citra Lekha* Volume 2, Nomor 2 Tahun 2017 kali ini.

Edisi ini diawali dengan tulisan pertama, karya Nina Witasari berjudul “Antara Kemanfaatan dan Keseimbangan: Mangkunegara VII dan Pengelolaan Hutan Mangkunegaran”. Seperti tampak pada judulnya, artikel ini secara eksplisit menyajikan peranan Mangkunegara VII dalam mengelola hutan Mangkunegaran. Ia mengemukakan bahwa dasar-dasar tentang pemahaman kelestarian hutan telah dimiliki oleh masyarakat tradisional, dalam hal ini rakyat Mangkunegaran. Dalam sistem pengetahuan tradisional terdapat banyak hal yang dapat dipelajari mulai dari jenis, kegunaan hingga bagaimana hidup berdampingan dengan alam secara seimbang. Mangku-negara VII juga disebut telah menjalankan politik lingkungan yang visioner. Ia mampu menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomis dan kepentingan politis serta tetap berorientasi pada pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan.

Tema sejarah politik keagamaan tampak pada artikel kedua, karya Moh. Rosyid yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-Anggota Gerakan Fajar Nusantara”. Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap upaya perlindungan masyarakat, yang menunjukkan bahwa pemerintah lokal tidak banyak memberikan bantuan kepada eks-anggota Gafatar untuk kembali dan menetap di kampung halaman mereka. Eks-Gafatar sulit mendapatkan penerimaan dari masyarakat karena eksistensi organisasi ini yang dianggap inkonstitusional. Padahal, kelompok eks-Gafatar membutuhkan lebih banyak akses dalam lapangan pekerjaan dan sumber keuangan.

Kebijakan tentang pendidikan, secara khusus menjadi perhatian artikel yang ketiga, karya Langgeng Sulistyو Budi berjudul “Bersekolah di Tanah Pengasingan: Boven Digul, 1927-1943”. Ia menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan di kamp pengasingan Boven Digul pada periode antara 1927-1943, didirikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di kamp pengasingan bagi keluarga para tahanan politik. Untuk mewujudkan hal itu, pada 1927, pemerintah Belanda mendirikan *Standardschool*, dan kemudian menjadi *Standardschool met Nederlandsch*. Kelompok tahanan *naturalisten* juga diizinkan untuk mendirikan sekolah bernama *Malay English School* (MES), yang kemudian menjadi sekolah “tiga keluarga”, dan diadakan di rumah-rumah para tahanan. Baik *Standardschool*, MES maupun sekolah “tiga keluarga” hanya diperuntukkan bagi keluarga para tahanan politik. Oleh karena itu, keberadaan sekolah-sekolah itu tidak memberi pengaruh pada masyarakat asli di sekitar kamp pengasingan.

Penataan kawasan perkotaan, juga menjadi aspek sejarah politik yang penting. Hal ini tampak pada artikel keempat, karya Radjimo Sastro Wiyono berjudul “Di Bawah Bayang-Bayang Ibukota: Penataan Daerah di Provinsi Banten dari Zaman Kolonial sampai Zaman Reformasi”. Artikel ini membahas reformasi wilayah yang berlangsung di provinsi termuda di Indonesia, Banten, sejak zaman penjajahan Belanda sampai era

reformasi. Reformasi wilayah yang terjadi di Banten, yang dulunya merupakan faktor penting dalam sejarah Indonesia sangat menarik untuk dipelajari. Menurutnya, perubahan kebijakan reformasi teritorial oleh para penguasa tentu membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik sosio-politik, sosio-ekonomi, dan kehidupan sosio-kultural masyarakat majemuk yang memiliki keyakinan dan kebiasaan yang berbeda.

Artikel kelima, karya Haryono Rinardi berjudul “Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia” tampak mewakili minat kajian sejarah politik dengan sudut pandang hukum. Menurut Rinardi, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia, adalah absah dari segi hukum. Untuk menjawab persoalan hukum yang menyertai peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, ia mengungkap terlebih dahulu latar belakang peristiwa. Melalui artikel ini pula, ia memperkuat kembali pendapat, bahwa gagasan kemerdekaan Indonesia secara legal formal diperoleh melalui proses perjuangan yang panjang, dan bukan merupakan “hadiah” atas praktik kolonialisasi yang berlangsung saat itu.

Kajian sejarah politik lingkungan, menjadi perhatian kembali dan tampak jelas pada artikel Yety Rochwulaningsih yang berjudul “Dinamika Gerakan Lingkungan dan *Global Environmental Governance*”. Melalui metode sejarah kritis dengan pendekatan politik ekologi, tulisan ini mengkaji peristiwa bencana alam tanah longsor yang menjadi ancaman serius terhadap kehidupan masyarakat. Ia mengemukakan bahwa intensitas bencana tanah longsor yang semakin tinggi dan merata di berbagai kawasan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan ekonomi politik pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam dan masifnya penetrasi sistem ekonomi kapitalis global yang sangat ekspansif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Akibatnya tidak lain adalah kerusakan ekosistem dan bencana alam yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat.

Sebagai penutup, ada ungkapan yang menyatakan bahwa *history is past politics, politics is present history* (sejarah adalah politik masa lalu, politik adalah sejarah masa kini). Orang boleh saja tidak sepakat dengan hal itu. Namun, orang harus mengakui bahwa kehidupan manusia akan selalu bersinggungan dengan “dunia” politik. Di sinilah tugas dari sejarah politik itu, yakni memberikan sentuhan waktu, perkembangan, perubahan, dan kesinambungan. Melalui cara kerja seperti itu, meminjam pendapat Kuntowijoyo (2003: 176), sejarah (baca: politik) dapat bermanfaat untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Selamat membaca.

REFERENSI

Kuntowijoyo (2003). *Metodologi Sejarah*, Edisi II. Yogyakarta: Tiara Wacana.